LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK (PPID)
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2022

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:
https://tnde.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-001644-SRT-0320234_conv.pdf

KEBIJAKAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan wujud dari proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia, serta tuntutan dari kehendak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Dalam proses keterlibatan masyarakat perlu di akomodasikan dengan cara menempuh jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi. Dalam kaitan ini, pengelolaan informasi dan dokumentasi publik diharapkan tidak sampai mengganggu prinsip kehati-hatian dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan yang lebih luas. Masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam mengelola informasi dan dokumentasi bagi masyarakat. Untuk itu sebagai upaya menyamakan persepsi dalam menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik, maka disusun Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik Pemerintah Kota Denpasar.

Pemerintah Kota Denpasar menyambut positif keterbukaan informasi tersebut. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Pemerintah Kota Denpasar telah menerbitkan Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Perwali tersebut ditindaklanjuti dengan dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/2176/HK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar khususnya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar, PPID menetapkan 5 (Lima) SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang terdiri dari: (1) SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; (2) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik ; (3) SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik; (4) SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik; (5) SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik. Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Infromasi yang Dikecualikan (DIK). Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Infromasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

STRUKTUR ORGANISASI

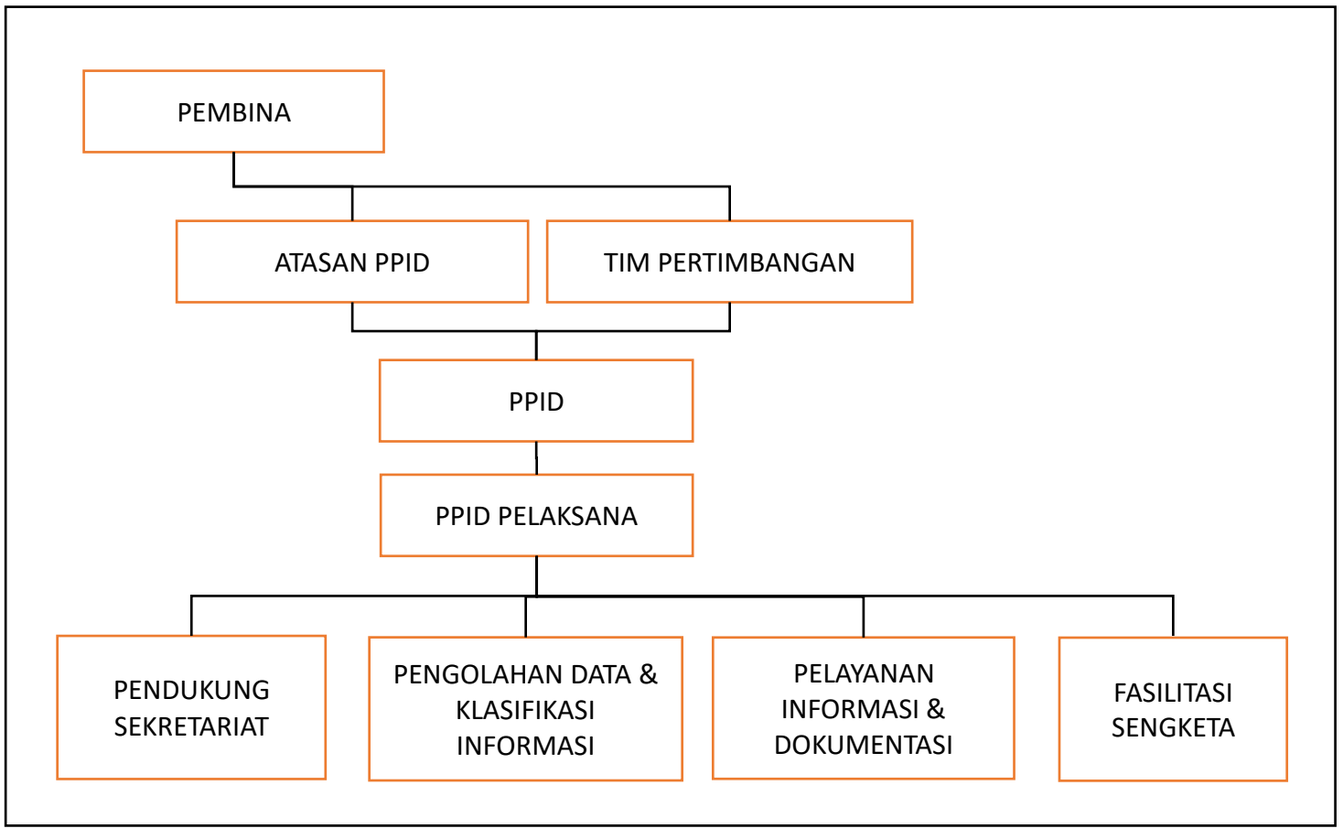

GAMBARAN UMUM
PELAKSANAAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan Prasarana

Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.

Foto Layanan Informasi Publik

Disamping penyediaan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail kominfo@denpasarkota.go.id dan aplikasi online PRO Denpasar (pengaduan.denpasarkota.go.id) dan ppid.denpasarkota.go.id. dan juga potal denpasarkota.go.id Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas layanan PPID.

JALUR DAN WAKTU
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

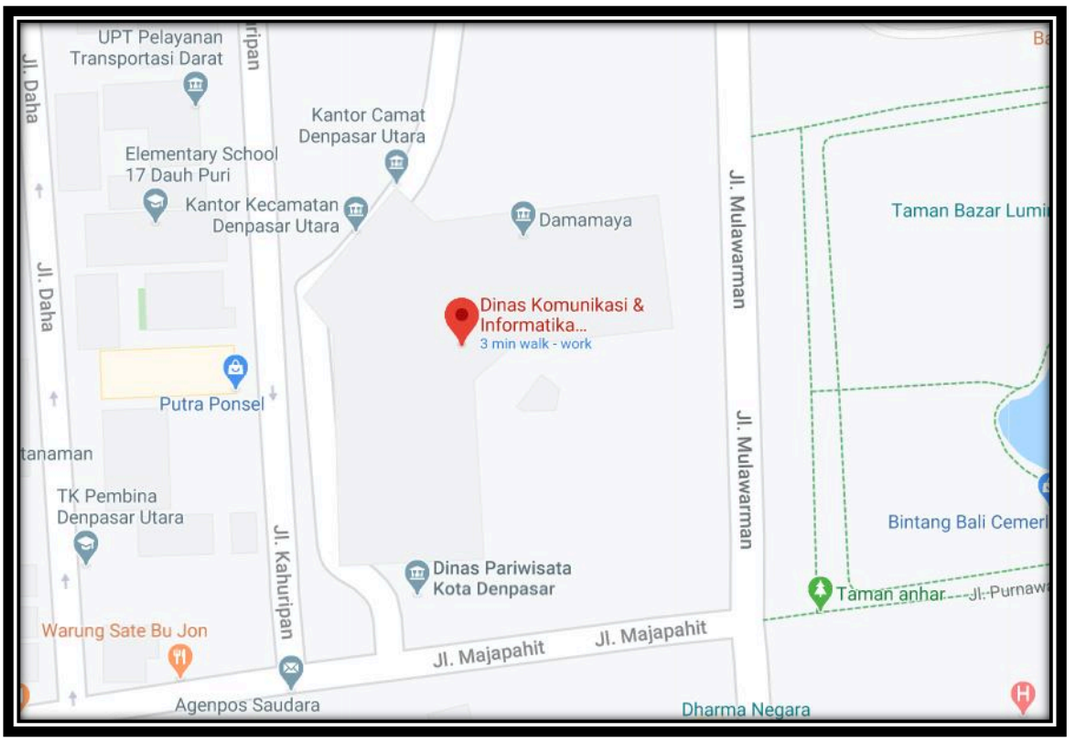

1. Alamat PPID Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar :
   Graha Sewakadarma Lt 3. Jalan Majapahit No 1 Denpasar
2. Website : - ppid.denpasarkota.go.id
   - denpasarkota.go.id
   - kominfo.denpasarkota.go.id
3. Email : kominfo@denpasarkota.go.id
4. Telp. **: 0361- 431229**
5. Jam Kerja : **Senin – Kamis 07.30 – 15.30**
   Jumat : **07.30 – 13.00**

PERMOHONAN INFORMASI SECARA ONLINE

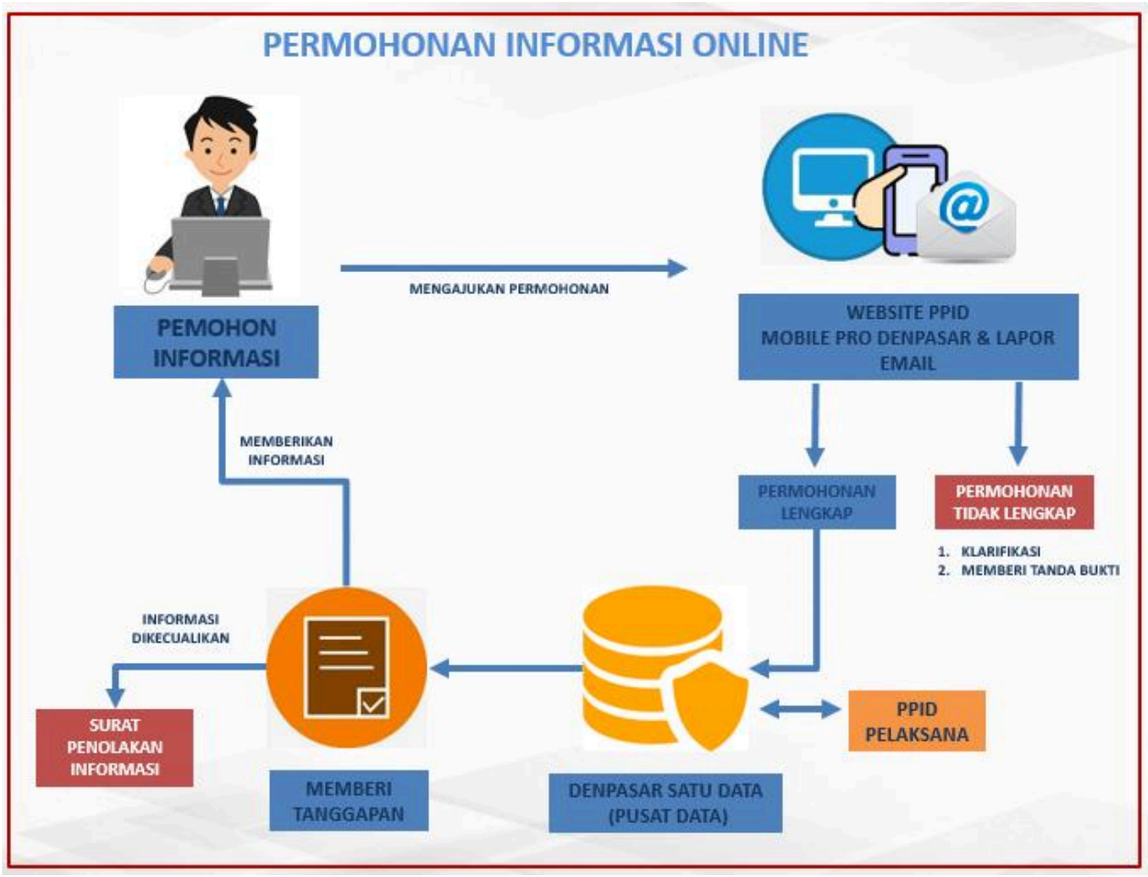

SALURAN PERMOHONAN INFORMASI SECARA ONLINE

WEBSITE PPID www.ppid.denpasarkota.go.id

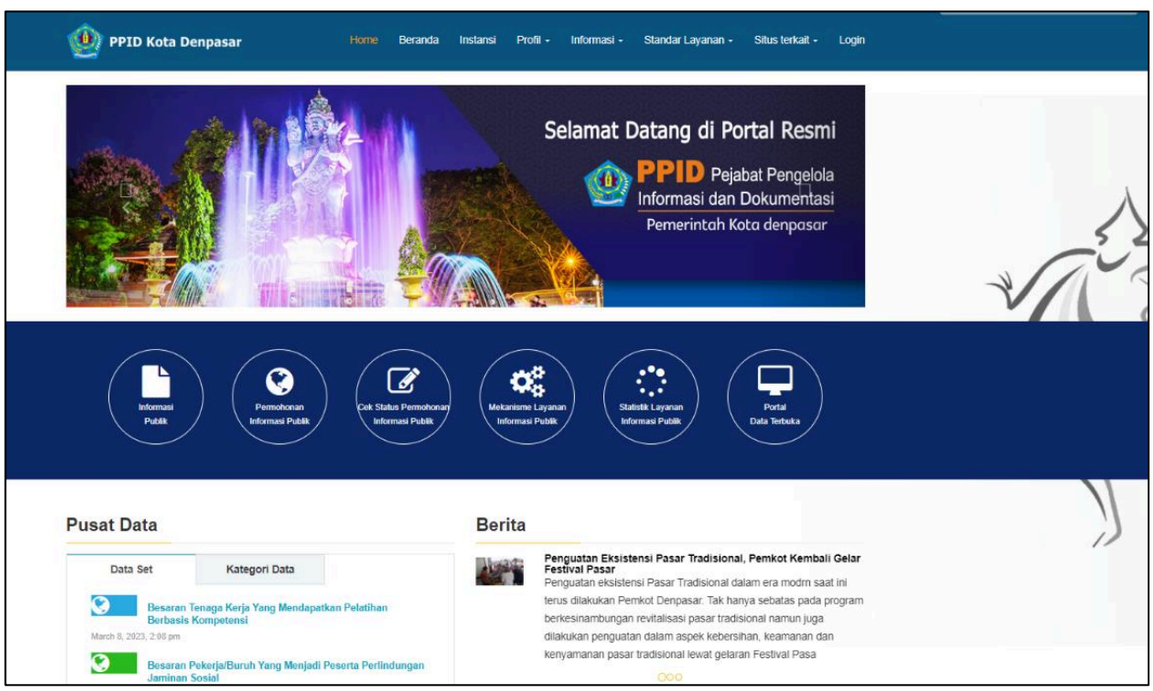

WEBSITE & MOBILE PRO DENPASAR www.pengaduan.denpasarkota.go.id

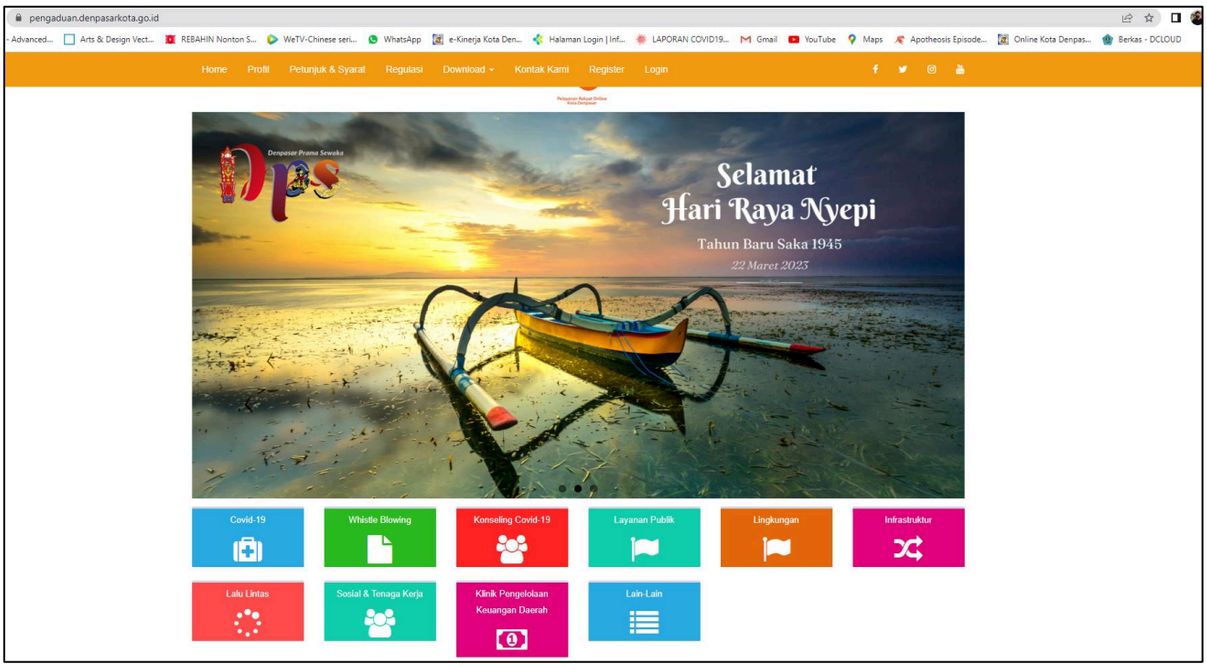

WEBSITE & MOBILE SP4N LAPOR www.lapor.go.id

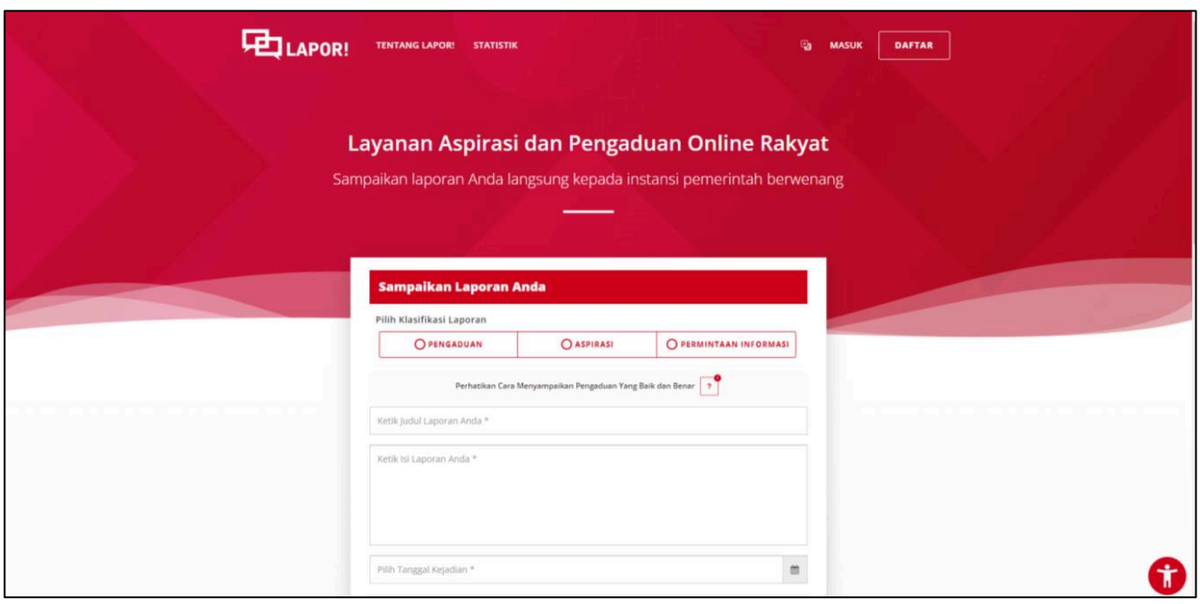

KANAL PENYEBARLUASAN INFORMASI

WEBSITE PORTAL DENPASAR www.denpasarkota.go.id

Portal resmi Pemerintah Kota Denpasar yang berisi informasi-informasi terkini tentang Kota Denpasar

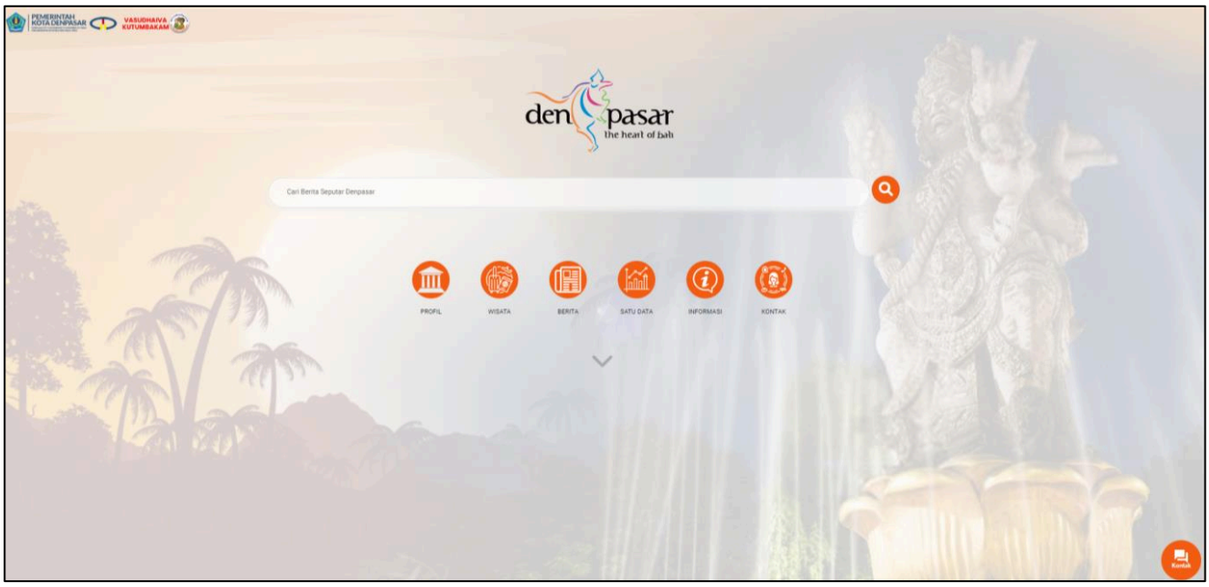

SUBDOMAIN

Subdomain seluruh Perangkat Daerah, Desa, Kelurahan yang ada di Kota Denpasar yang terintegrasi dengan website Kota Denpasar

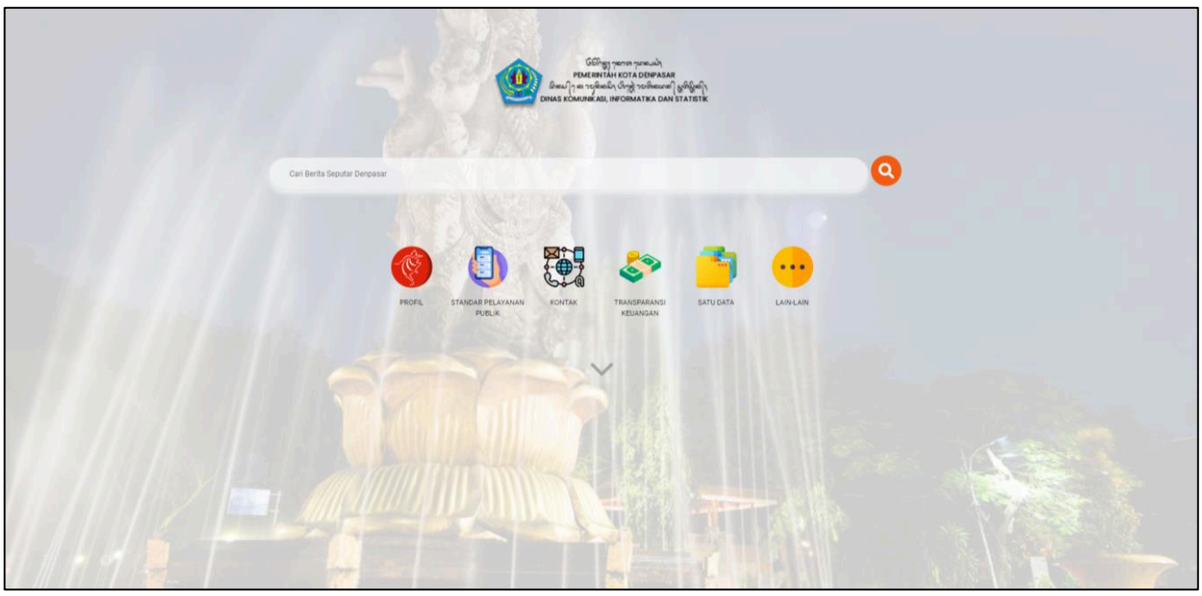

SATU DATA DENPASAR https://satudata.denpasarkota.go.id/

Portal Satu Data Kota Denpasar ditujukan untuk mempermudah publik dalam mengakses data dan informasi mengenai Kota Denpasar. Data-data yang ditampung dalam sistem ini dapat berupa tabel (.csv, .xlsx), dokumen (.pdf, .docx), presentasi (.pptx) dan data spasial (.shp, .kmz, .tiff).

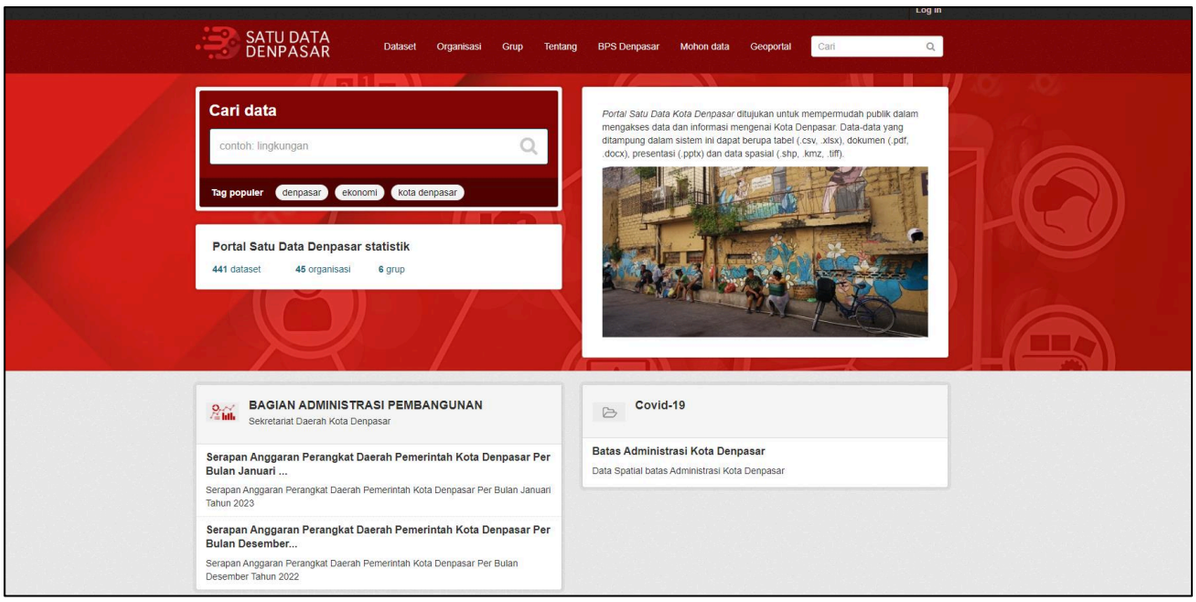

WEBSITE TANGKAL HOAX (TABOO) https://tangkalhoax.denpasarkota.go.id/

Tangkal dan analisa berita bohong (TABOO) merupakan Layanan Pemerintah Kota Denpasar untuk membantu memverifikasi verita bohong agar tidak menyebar luas.

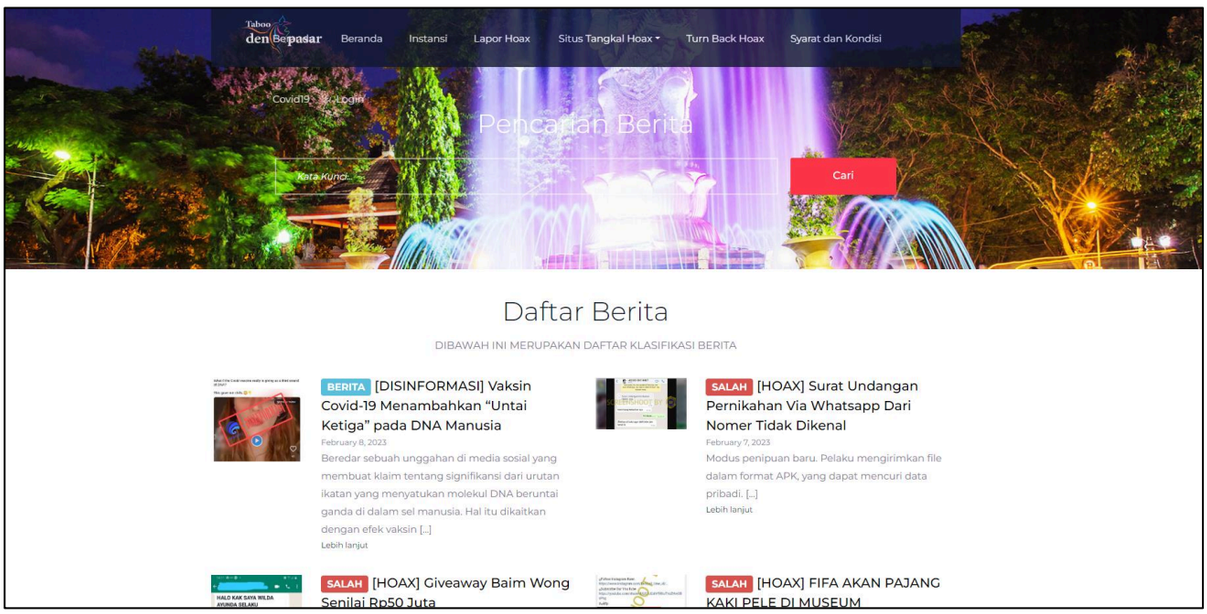

WEBSITE SAFE CITY https://safecity.denpasarkota.go.id/

Informasi Daerah rawan bencana (Demam berdarah, Kecelakaan, Konflik, bencana alam, kebakaran, criminal dan lainnya di Kota Denpasar

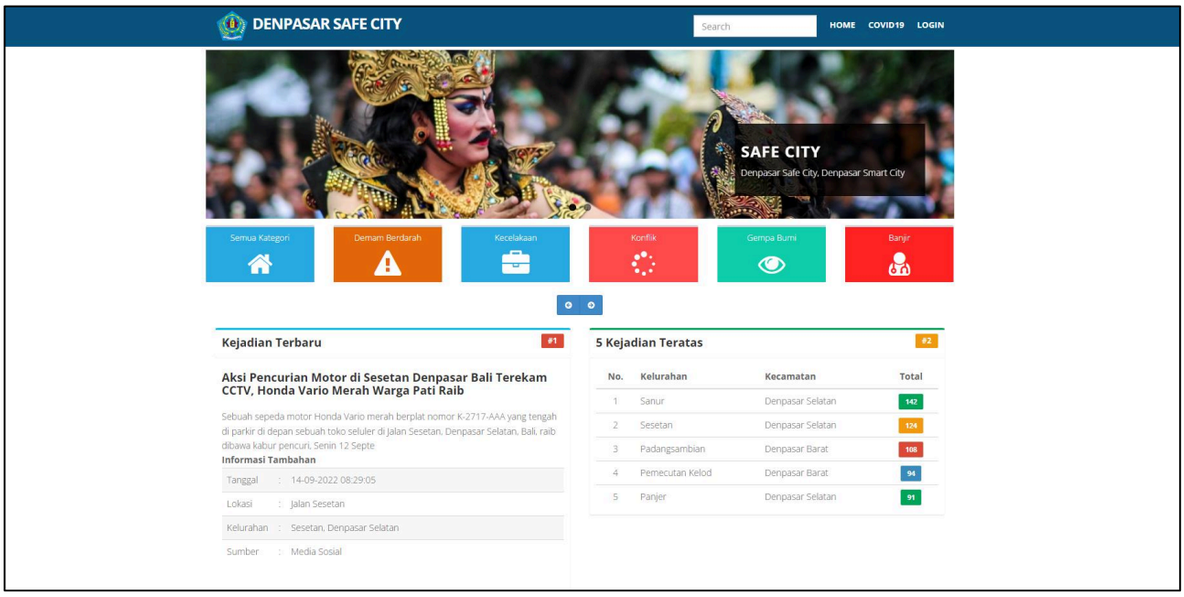

WEBSITE COVID19

Informasi tentang sebaran dan informasi penting lainnya tentang covid19 di Kota Denpasar

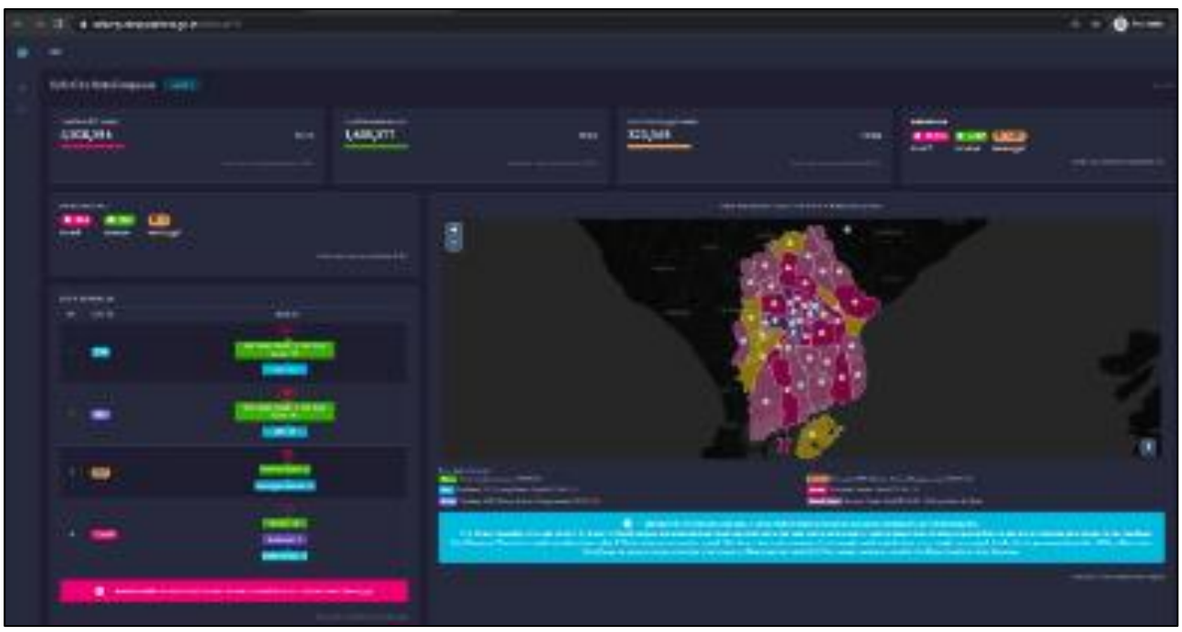

CHATBOT DAIVA

Denpasar Information Virtual Assistant (DAIVA) merupakan Sebuah hasil kolaborasi sinergis dari seluruh perangkat daerah di Kota Denpasar dengan berlandaskan spirit “Vasudhaiva Kutumbakam”, semangat menyama braya. DAIVA menyediakan layanan informasi terpadu, one-stop service chat bot, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses segala informasi yang dibutuhkan mengenai Kota Denpasar hanya dalam satu genggaman.

CHATBOT DESAC

Denpasar Siaga Covid19 (DESAC) merupakan layanan berbasis chatbot whatsApp yang digunakan untuk menghubungkan langsung antara pemerintah dengan warga terkonfirmasi positif yang bersumber dari Dinas Kesehatan

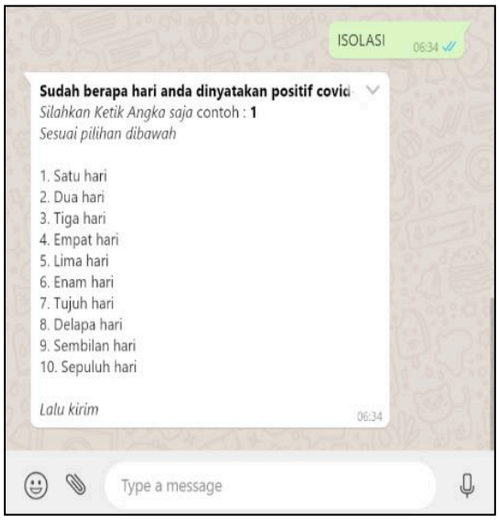

REKAPAN PERMOHONAN INFORMASI

Rekapitulasi laporan pelayanan informasi publik tahun 2022 dapat diuraikan berdasarkan Perangkat Daerah yang dapat dilihat pada table berikut :

NO	BADAN PUBLIK	JUMLAH PERMINTAAN	DIPENUHI	DITOLAK	PROSES	KET
1	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	0	0	0	0	NIHIL
2	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	5	5	0	5	
3	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	16	16	0	16	
4	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	2	2	0	2	
5	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	4	4	0	4	
6	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	8	8	0	8	
7	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	456	456	0	456	
8	Kepala Badan Kesbang dan Politik Kota Denpasar	21	21	0	21	
9	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	11	11	0	11	
10	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	2	2	0	2	
11	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	24	24	0	24	
12	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	3298	3298	0	3298	
13	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	21	21	0	21	
14	Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar	584	584	5	579	
15	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	16	16	0	16	
16	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar	712	707	5	707	- ditolak berdasarkan lembar pengujian konsekuensi Nomor 112 Tahun 2022 tentang Informasi Publik yang dikecualikan - Ditolak berdasarkan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 112 Tahun 2022 tentang Informasi Publik dikecualikan - Ditolak berdasarkan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 112 Tahun 2022 tentang Informasi Publik dikecualikan
17	Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar	20	20	0	20	

18	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	16	16	0	16	
19	Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar	11	11	0	11	
20	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	67	67	0	67	
21	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	5	4	1	4	Satu belum dipenuhi karena di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tidak mengampu data subak Intaran Barat
22	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	10	10	0	10	
23	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	59	59	0	59	
24	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar	0	0	0	0	NIHIL
25	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Denpasar	6	6	0	6	
26	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	132	132	0	132	
27	Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar	75	75	0	75	
28	Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar	960	960	0	960	Terpenuhi secara keseluruhan dalam bentuk permintaan informasi, bantuan ataupun pengaduan orang terlantar. Pengaduan dijumlahkan melalui media sosial instagram, email, pro denpasar, juga jumlah pengaduan dan permintaan secara offline dari masyarakat ke kantor Dinas Sosial Kota Denpasar
29	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	15	15	0	15	
30	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	5	5	0	5	
31	Direktur RSUD. Wangaya Kota Denpasar	34	34	0	34	
32	Direktur Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar	23	23	0	23	
33	Direktur Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar	45	45	0	45	
34	Direktur Perumda Bhukti Praja Sewakadarma	17	17	0	17	
35	Kecamatan Denpasar Timur	0	0	0	0	NIHIL
36	Kecamatan Denpasar Utara	9	9	0	9	
37	Kecamatan Denpasar Selatan	0	0	0	0	NIHIL
38	Kecamatan Denpasar Barat	0	0	0	0	NIHIL
39	Kelurahan Dangin Puri	3	3	0	3	
40	Kelurahan Sumerta	0	0	0	0	NIHIL
41	Kelurahan Kesiman	10	10	0	10	
42	Kelurahan Penatih	0	0	0	0	NIHIL
43	Kelurahan Pemecutan	23	23	0	23	
44	Kelurahan Padangsambian	0	0	0	0	NIHIL
45	Kelurahan Dauh Puri	1	1	0	1	
46	Kelurahan Serangan	0	0	0	0	NIHIL
47	Kelurahan Pedungan	0	0	0	0	NIHIL
48	Kelurahan Sesetan	22	22	0	22	
49	Kelurahan Panjer	4	4	0	4	

50	Kelurahan Renon	57	57	0	57	
51	Kelurahan Sanur	33	33	0	33	
52	Kelurahan Ubung	2	2	0	2	
53	Kelurahan Tonja	6	6	0	6	
54	Kelurahan Peguyangan	8	8	0	8	
55	Desa Dangin Puri Kelod	115	115	0	115	
56	Desa Sumerta Kaja	4	4	0	4	
57	Desa Sumerta Kelod	14	14	0	14	
58	Desa Sumerta Kauh	0	0	0	0	NIHIL
59	Desa Kesiman Petilan	0	0	0	0	NIHIL
60	Desa Kesiman Kertalangu	47	47	0	47	
61	Desa Penatih Dangin Puri	2	2	0	2	
62	Desa Dauh Puri Kauh	26	26	0	26	
63	Desa Dauh Puri Kangin	58	58	0	58	
64	Desa Dauh Puri Kelod	26	26	0	26	
65	Desa Padangsambian Kaja	0	0	0	0	NIHIL
66	Desa Padangsambian Kelod	21	21	0	21	
67	Desa Pemecutan Kelod	0	0	0	0	
68	Desa Tegal Harum	24	24	0	24	
69	Desa Tegal Kerta	10	10	0	10	
70	Desa Dauh Puri Kaja	70	70	0	70	
71	Desa Sidakarya	2	2	0	2	
72	Desa Pemogan	0	0	0	0	NIHIL
73	Desa Sanur Kauh	29	29	0	29	
74	Desa Sanur Kaja	14	14	0	14	
75	Desa Pemecutan Kaja	0	0	0	0	NIHIL
76	Desa Ubung Kaja	7	7	0	7	
77	Desa Peguyangan Kaja	8	8	0	8	
78	Desa Peguyangan Kangin	36	36	0	36	
79	Desa Dangin Puri Kaja	51	51	0	51	
80	Desa Dangin Puri Kauh	10	10	0	10	
81	Desa Dangin Puri Kangin	10	10	0	10	
	JUMLAH	7.442	7.430	11	7.430	

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

PPID Pemerintah Kota Denpasar memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya. Pada tahun 2022 tidak terjadi sengketa informasi publik.

CAPAIAN PPID TAHUN 2022

PPID Pemerintah Kota Denpasar mendapatkan apresiasi penilaian oleh komisi informasi Bali peringkat ke 1 dalam monitoring dan evaluasi Badan Publik OPD dan Desa se Bali tahun 2022 sebagai Praja Anindita Mahottama.

KENDALA

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- Pemahaman terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik belum secara optimal merata di seluruh OPD, Desa dan Lurah;

- Kendala teknis pada web PPID, menyebabkan alur informasi, verifikasi pemohon dan pengiriman informasi yang diminta pemohon tidak dapat dilaksanakan melalui web PPID.

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

- Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Kominfo Kota Denpasar;
- PPID terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Bali;
- Pengembangan web PPID yang terintegrasi dengan pusat terkait data yang diinformasikan dan PRO Denpasar terkait permintaan informasi publik dengan konsep Denpasar dalam satu genggaman.
- Pengembangan apikasi mobile dalam penyebarluasan informasi dan pelayanan publik yang rumah besar aplikasi berbasis Mobile Kota Denpasar untuk layanan satu aplikasi dalam satu genggaman yang diperuntukan untuk masyarakat secara luas dan dunia usaha

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama

Pemerintah Kota Denpasar

Dokumen ini ditanda tangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Denpasar
Dr.Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP, M.Si
Pembina TK.I / IV.b
Nip.19780128 199612 1 003